

**KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh:

MARIA CHRISTINA



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

MARIA CHRISTINA

Program pendampingan desa merupakan program yang bertujuan mempercepat pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaan pendampingan desa tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan pendampingan desa, Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pendamping Lokal Desa juga tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Selain itu, Pendamping Lokal Desa tidak melaksanakan pendampingan dan hanya terfokus pada penyusunan laporan kerjanya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun metode yang peneliti gunakan yakni, metode kualitatif deskriptif, jenis datanya data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah.

Hasil dari penelitian menunjukkan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja (*achievement*) Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif, karena pelaksanaan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik. Keahlian (*skill*) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja. Perilaku (*attitude*) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya. Kepemimpinan (*Leadership*) terkait dengan koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor

kualitas dan kemampuan masih sangat rendah. Selanjutnya sarana pendukung belum tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.

Kata kunci: Kinerja, Pendampingan, Pembangunan.

ABSTRACT

LOCAL COMPANY PERFORMANCE OF THE VILLAGE IN INCREASING VILLAGE'S ESTABLISHMENT IN SUBDISTRICT KALIREJO OF LAMPUNG TENGAH REGENCY

By

MARIA CHRISTINA

The program's mentoring of the village is program's to find out the acceleration of the development of the village. But in the program's mentoring of the village does not been able to assist as expected. This is because in the implementation of The program's mentoring of the village, local escort villages does not have a work experience and knowledge about the construction of the village and community empowerment. local escort villages also did not know the tasks and functions. In addition, Local Escort Village does not implement mentorship and just focused on the preparation of the report.

The aim of this study is to find out the local Villages as well as Companion performance factors that affect the performance of the local Escort village. As for the methods that researchers used is qualitative descriptive methods, types of data primary data and secondary data that is retrieved by using the method of interviewing, observation, and documentation. Then those were analyzed, presented, and validated in order to become a scientific research.

The results of the research showed, a performance conducted by mentoring Local Escort Village was not adequate. On the indicator work achievement, Escort of local Villages have not showed positive results and has not been implemented to its full potential. Expertise (skill) of Local Escort Village is still very low and does not have work experience. Behaviour (attitude) related to accountabilities of Local Escort Village is incompatible with the execution of the work. Leadership related to the coordination carried out by the local village with Accompanying village chief has not been optimally implemented. While the factors that affect the performance, on the quality and ability is still very low. Further means of supporting is not yet available in the implementation of mentoring in the village.

Keywords: Performance, Mentoring, Development.

**KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

MARIA CHRISTINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI
KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**


Nama Mahasiswa : **Maria Christina**

No. Pokok Mahasiswa : **1316021048**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

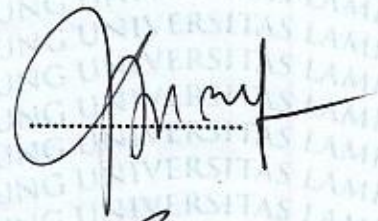
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **03 Agustus 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Maria Christina
1316021048

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Poncowarno pada Tanggal 24 Mei 1995. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Marsiman dan ibu Sartiyah. Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan TK Fransiskus Kalirejo pada tahun 2001, dilanjutkan Sekolah Dasar di SDN 5 Poncowarno pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius Kalirejo pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kalirejo pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan 2013, di Universitas Lampung. Peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2016 di Desa Harapan Jaya, Pesawaran.

MOTTO

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.

(Mahatma Gandhi)

*Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat,
gelaplah tubuhmu.*

*Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu
jangan menjadi kegelapan*

(Lukas 11:34:35)

*Aku berencana tetapi allah yang berkehendak
Ketika aku menginginkan sesuatu tetapi tak kunjung juga aku dapatkan*

Aku takkan menyerah

Sebab aku percaya

Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik

Dari apa yang aku bayangkan

Do or do not, there is no try

(Maria Christina)

PERSEMBAHAN

*Dengan Ketulusan dan Kerendahan Hati Aku Panjatkan
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena Telah
Melimpahkan Kasih Karunianya yang Tak Ternilai*

*Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:
Bapak dan Mamak Tercinta
Karya yang tidak seberapa ini kupersembahkan sebagai
bukti rasa cinta dan tanggung jawabku.
Semoga hasil perjuanganku selama kuliah bisa buat Bapak
dan mamak bangga*

*Terimakasih untuk saudara seperjuangan di Ilmu
Pemerintahan serta Para Pendidikku Pahlawan Tanpa Jasa
yang Ku Hormati*

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur peneliti haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri peneliti.

Pada kesempatan ini, peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Budi Harjo, M.I.P selaku Pembimbing pertama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.I.P selaku Pembimbing dua yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini.

Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
7. Bapak (FX.Marsiman) dan Ibu (F.Sartiyah) atas semua kasih sayang dan cintanya yang luar biasa. Terimakasih atas semua doa, penyertaan, kesabaran dan segala sesuatu yang telah diberikan kepadaku selama ini. Terima kasih selalu menjadi sandaran dan penguat dalam setiap ritme kehidupan yang kujalani;
8. Adik (Agnes Sri Handayani) atas doa, motivasi, canda, tangis dan tawa. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan;
9. Keluarga besar Mbah Sanarja, Mbah Satimah, Pakde Tirin, Bude Sam, Pakde Kadimun (Alm), Bude Lasini, Mba Ani, Mas Jay, Wah Nina, Mas Pur, Mas Dedi, Teh Ijah, Om Nahardin, Bibi Tursinah, Lek Wardiyo, Bibi Siti, Om Gito, Bibi Sulis terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta pengajaran kehidupan kepada peneliti, dan sepupu dan keponakan tersayang Eko Adriyanto, Dwi Suryani, Pino Nugeraha, Maya Lestari, Ato, Dedi Wahyono, Anggi Deni, Jessen, Diki Wahyudi, Noval Saputra, Afriliana Putri Purnomo, Nadia, Raka Fahreza,

Samino, Piko, Jihan terimakasih karena selalu memberikan semangat dan selalu tanya kapan wisudanya;

10. Sahabat yang hebat dan luar biasa, Tiara Dhayu Prameswari dan Aziza Aulia Fahmi. Terima kasih atas canda, tawa dan kebersamaan selama menjalani pendidikan di Ilmu Pemerintahan Unila. Semoga persahabatan dan persaudaraan ini dapat terus terjalin selamanya;

11. Om Hendri Djatmiko yang telah memberikan ilmu, waktu, semangat, dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Saudara seperjuangan di Ilmu Pemerintahan (Yolanda Margaretha Silaen, S.IP., Bobbi K Barasa, S.IP., Amanda Cicilia NS, S.IP., Dormatio Manik, S.IP., Ina Wijaya, S.IP., Restiani Damayanti, S.IP., Fina Ria Tisa, S.IP., Vivi Alvionita, S.IP., Kenn Sindy, S.IP., Agnessia Diknas Pitaloka, S.IP., Ipnika Nurfasari, S.IP., Nadia Maudyna, S.IP., Risky Nitha, S.IP., Chici Afrianita, S.IP., Putri Aphrodite, S.IP., Defa Septia, S.IP., Oca Pawalin, S.IP., Rini Setiawati, S.IP., Lusita Anjelina, S.IP., Riski Atika, S.IP., Bustanul Haimia, S.IP., Dwi Titiawati, S.IP., Yogi Noviantama, S.IP., Tri Hendra, S.IP., Ahmad Irfan, S.IP., Rifki Febrihanudin, S.IP., M Ibnu Fadhil, S.IP., Rizki Aristoni, S.IP., Bagaskoro Adi Wibowo, S.IP.,) terima kasih untuk waktu dan kebersamaan yang pernah mengisi keseharian peneliti, semoga pertemanan kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih;

13. Sahabat-sahabat SMA Tuti Musolihah, Wahidah Fitriani, Susi Candrawati, Sari Dewi, Dewi Anggarwati, Siti Fatimah, Mei Ika Lestari, dan Nur

Rohmah yang selalu memberikan semangat, dukungan, penghiburan walaupun dengan perbedaan dimensi tempat;

14. Keluarga KKN Desa Harapan Jaya, Anissa, Ferza, Kak Edo, Kak Aprian, Mba Meta, Halimah, Bapak dan Ibu Bibit, Bapak dan Ibu Dahrum, Bapak dan Ibu Bustama, terimakasih atas pengalaman, kerjasama, dan kebersamaan selama 60 hari menjalani program KKN;
15. Putri Ayu Yunita, S.AB yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2017
Peneliti

Maria Christina

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kinerja	16
1. Pengertian Kinerja	16
2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	18
3. Penilaian Kinerja.....	19
4. Tujuan Penilaian Kinerja	21
5. Indikator Kinerja.....	22
B. Konsep Pendamping Lokal Desa.....	23
1. Peraturan Tentang Pendamping Lokal Desa.....	23
2. Tugas Pendamping Lokal Desa	25
C. Konsep Pembangunan Desa.....	28
1. Pengertian Pembangunan Desa.....	28
2. Tujuan Pembangunan Desa.....	29
3. Strategi Pembangunan Desa	31
D. Kerangka Pikir Penelitian	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Teknik Wawancara	45
2. Dokumentasi	47
3. Observasi	47

F. Teknik Pengolahan Data.....	48
1. Editing Data.....	48
2. Interpretasi Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
1. Reduksi Data.....	50
2. Penyajian Data.....	50
3. Verifikasi Data.....	51
H. Teknik Keabsahan Data.....	52

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Kalirejo.....	53
1. Letak Geografis.....	53
2. Luas Wilayah.....	56
3. Kependudukan.....	56
B. Gambaran Umum Pendampingan Desa.....	57
1. Struktur Pelaksanaan Pendampingan Desa.....	57
2. Profil Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kalirejo.....	59

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	62
1. Prestasi Kerja (<i>Achievement</i>).....	62
2. Keahlian (<i>Skill</i>).....	68
3. Perilaku (<i>Attitude</i>).....	74
4. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>).....	77
5. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	80
a. Kualitas dan Kemampuan.....	80
b. Sarana Pendukung.....	84
B. Pembahasan.....	87
1. Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.....	88
a. Prestasi Kerja (<i>Achievement</i>).....	89
b. Keahlian (<i>skill</i>).....	92
c. Perilaku (<i>Attitude</i>).....	94
d. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>).....	97
2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.....	99
a. Kualitas dan Kemampuan.....	99
b. Sarana Pendukung.....	103

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Beberapa Kasus Terkait Pendampingan Desa	4
2. Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2015.....	8
3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tahun 2015.....	8
4. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	10
5. Daftar Informan.....	46
6. Jumlah Penduduk Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	57
7. Profil Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	37
2. Struktur Pendampingan Desa.....	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa.

Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa.

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan desa. Kemudian pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program PNPM untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa pada tahun 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2014.

Guna mengatasi permasalahan pembangunan di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 1 Juli 2015 menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan di setiap Desa. Tim seleksi Pendamping Lokal Desa di provinsi berjumlah tujuh orang yang terdiri dari dua orang dari Pemerintah Pusat, dua orang dari Pemerintah

Provinsi, dan tiga orang dari Perguruan Tinggi Negeri. Panitia dalam seleksi pendamping profesional tersebut dikoordinir oleh Perguruan Tinggi Negeri serkaligus bertanggungjawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa. (Sumber: <http://forum.liputan6.com> di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 19.55)

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diharapkan mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis

prioritas pemerintahan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam implementasi pendamping desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Fenomena yang berkaitan dengan kinerja dari pendampingan desa dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Beberapa Kasus terkait Pendampingan Desa

No.	Lokasi	Permasalahan	Sumber
1	Palas, Lampung Selatan	Pendampingan pengelolaan dana desa tidak di laksanakan dengan maksimal oleh pendamping lokal desa serta permasalahan mengenai pembangunan infrastruktur desa, pendamping lokal desa hanya sibuk di saat penyusunan laporan kinerjanya.	Lampost.com di akses pada Jumat 13 Januari 2017 pukul 13.25
2	Simalungun, Sumatera Utara	Pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya serta rendahnya kemampuan pendamping lokal desa dalam membina kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai salah satu syarat administrasi pemanfaatan dana desa	http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=10&date=2016-06-08 di akses pada Minggu 22 Januari 2017 pukul 10.26
3	Gresik	Pendamping lokal desa tidak mengetahui tentang administrasi dan tidak mengetahui cara pencairan dana desa. Pendamping lokal desa di siapkan untuk mendampingi Kepala Desa mengurus Dana Desa, mulai dari persiapan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Desa.	http://jatim.metrotvnews.com/kinerja-pendamping-desa-kades-mereka-malah-tolah-toleh- di akses pada Jumat 20 Januari 2017 pukul 10.14
4	Jombang,	Kurang optimalnya	https://www.ba

	Jawa Timur	pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. 99% Pendamping Lokal Desa tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan desa.	ngsaonline.com/berita/27513/pendamping-desa-dituding-mlempem-tenaga-ahli-ajak-kades-laporan-untuk-evaluasi-kinerja-di-akses-pada-Jumat-13-Januari-2017-pukul-11.55
5	Sampang, Madura	Kinerja Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam pengelolaan dana desa di nilai masih lemah, terutama dalam segi pendampingan administrasi desa. Kemuadian adanya kelalaian pendamping desa dalam pengelolaan dana desa sehingga terjadi kasus dugaan pemotongan dana desa hingga terjadinya operasi tangkap tangan oleh Polda Jatim yang merupakan bentuk kelalaian pengawasan dari PLD yang masih setengah hati.	https://www.sk-hmemorandum.com/daerah/madura/item/9311-kinerja-pendamping-desa-perlu-dievaluasi-di-akses-pada-Sabtu-21-Januari-2017-pukul-09.12
6	Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat	Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng berhenti bertugas. Dari lima Pendamping Lokal Desa, tidak ada satupun yang hadir dalam pra musrenbang Kecamatan Pangkalan Banteng. Semestinya, Pendamping Lokal Desa menjalankan tugas salah satunya mendampingi pengisian usulan RPJM desa dalam pra musrenbang desa dan Kecamatan.	http://borneonews.co.id/berita/27374-tenaga-pendamping-lokal-desa-berhenti-bertugas-di-akses-pada-Senin-6-Februari-2017-pukul-20.27
7	Tulang Bawang Barat	PD dan PLD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, sehingga banyak keluhan yang telah masuk ke DPRD Tubaba terkait dengan hasil pekerjaan yang menggunakan dana desa (DD) dalam wilayah Tubaba. Hal ini	http://menaraneews.com/pendamping-desa-dan-pendamping-lokal-desa-kabupaten-tubaba-dinilai-

		harus menjadi atensi penting bagi seluruh PD dan PLD karena tujuan dari adanya pendamping desa untuk mengimplementasikan aturan sehingga dana yang begitu besar dapat bermanfaat	belum-optimal di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 20.38
8	Pidie, Aceh	Sejumlah tenaga Pendamping Lokal Desa di Kabupaten Pidie di duga rangkap jabatan. Sesuai aturan yang berlaku, PLD dilarang rangkap kontrak kerja dengan pihak lain termasuk penyelenggara pemilihan kepala daerah. Berdasarkan surat edaran BPM Aceh Nomor 414.25/4009/2016, perihal Larangan Pendamping Profesional Desa mengadakan Ikatan Kontrak.	http://portalsatu.com/read/news/pendamping-lokal-desa-di-pidie-ada-yang-rangkap-pekerjaan di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 20.53
9	Luwuk Utara	Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak melaporkan keberadaanya pada pihak Kecamatan sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui kewenangan yang dilakukan oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa yang nantinya dapat terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Seharusnya, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sudah melaporkan diri dan sudah melakukan aktivitas sebagai pendamping sesuai dengan SPT.	http://news.luwukpost.info/2015/11/13/luktar-kebagian-5-pendamping-desa diakses pada Selasa 7 Februari 2017 pukul 19.01
10	Bondowoso, Jawa Timur	Adanya permasalahan dan kurangnya koordinasi antara Pendamping Desa dengan Pendamping Lokal Desa yang mempengaruhi pembangunan desa. Pendamping Desa selama ini cenderung berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan PLD.	http://m.nganjuktimes.com/baca/139005/20160329/133245/kisruh-pd-dan-pld-di-bondowoso-pembangunan-desa-bisa-terganggu di akses pada Selasa 7 Februari 2017 pukul 19.27

Sumber: Dari berbagai sumber

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan beberapa bentuk permasalahan mengenai kinerja dari pendampingan desa di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu:

1. Pendampingan dalam pengelolaan dana desa tidak dilaksanakan dengan maksimal.
2. Pendamping Lokal Desa tidak memahami tugas dan fungsinya.
3. Rendahnya kemampuan yang di miliki oleh Pendamping Lokal Desa dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Kurangnya pengetahuan Pendamping Lokal Desa mengenai administrasi serta Pendamping Lokal Desa tidak mengetahui cara pencairan dana desa.
5. Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya.
6. Pendamping Lokal Desa merangkap jabatan di Institusi lain.
7. Kurangnya koordinasi antara Pendamping Lokal Desa dengan pihak kecamatan sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.
8. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Adanya persepsi yang buruk tentang Pendamping Lokal Desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Provinsi Lampung merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Hal ini karena

pada tahun 2015 desa maju yang terdapat di Provinsi Lampung hanya berjumlah 1 desa, sedangkan desa sangat tertinggal berjumlah 151 desa. Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015 di Provinsi Lampung dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2015

No.	Status Desa	Jumlah Desa	Persentase
1	Desa maju	1	0%
2	Desa mandiri	57	2%
3	Desa berkembang	912	38%
4	Desa tertinggal	1.302	54%
5	Desa sangat tertinggal	151	6%
Jumlah		2.423	100%

Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Berdasarkan data pada tabel 2 menunjukkan mayoritas desa di Provinsi Lampung berstatus desa tertinggal, dan hanya terdapat 1 desa yang berstatus desa maju. Sedangkan di kabupaten yang berada di Provinsi Lampung mayoritas masih berstatus desa berkembang. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu 0,6086 dengan status berkembang dan merupakan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Provinsi Lampung. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tahun 2015

No.	Kabupaten	IDM
1	Lampung Barat	0,5510
2	Tanggamus	0,5618
3	Lampung Selatan	0,6179
4	Lampung Timur	0,6069
5	Lampung Tengah	0,6086
6	Lampung Utara	0,5598
7	Way Kanan	0,5874
8	Tulang Bawang	0,5674

9	Pesawaran	0,5833
10	Pringsewu	0.6078
11	Mesuji	0,5658
12	Tulang Bawang Barat	0,5792
13	Pesisir Barat	0,5712

Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Berdasarkan tabel 3 di atas, Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi kedua di Provinsi Lampung. Pada program pendampingan desa, tidak ada lagi intervensi pemerintah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hanya memberikan rambu-rambu seperti Peraturan Menteri. Sementara terkait program dan kegiatan pembangunan desa, sepenuhnya menjadi kewenangan desa dengan dibantu oleh Pendamping Lokal Desa.

Namun pada tahun ketiga implementasi Undang-Undang Desa, kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengawal prioritas program nasional semakin diragukan. Selain menjadi sasaran utama pemangkasan anggaran dengan persentase tertinggi dilingkup kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2015 dan 2016, porsi alokasi anggaran kementerian terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurunnya alokasi anggaran Kementerian Desa setiap tahun menunjukkan bahwa kinerja kementerian yang membidangi urusan desa tidak lagi sesuai dengan harapan publik. Dari sisi kinerja anggaran, penyerapan anggaran pada dua tahun terakhir Kemendes sangat

tidak menggembirakan bagi masyarakat. (Sumber: Liputan6.com di akses pada pada Jumat 13 Januari 2017 pukul 19.57)

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti tanggal 26 Januari 2017 pukul 9.15 WIB kepada Bapak Henri Djatmiko selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan Kalirejo jarang berkoordinasi dengan pihak kecamatan terkait pendampingan dan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo. Pendamping Lokal Desa selama ini hanya berkoordinasi dengan Pendamping Desa (PD). Koordinasi yang buruk dari Pendamping Lokal Desa dengan pihak kecamatan membuat pihak kecamatan tidak mengetahui apa saja agenda pembangunan desa dari Pendamping Lokal Desa.

Permasalahan mengenai kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo sangat mempengaruhi peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di Provinsi Lampung, namun pada kenyataannya mayoritas desa yang berada di Kecamatan Kalirejo masih berstatus desa berkembang. Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kalirejo dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama Desa	IDM	Status
1	Sri Waylangsep	0,5976	Tertinggal
2	Way Krui	0,5288	Tertinggal
3	Kalirejo	0,6556	Berkembang
4	Balai Rejo	0,6162	Berkembang

5	Sri Basuki	0,6411	Berkembang
6	Kaliwungu	0,5985	Tertinggal
7	Kalidadi	0,6012	Berkembang
8	Srimulyo	0,6062	Berkembang
9	Sridadi	0,6677	Berkembang
10	Sukosari	0,6451	Berkembang
11	Watu Agung	0,5778	Tertinggal
12	Sinar Sari	0,6336	Berkembang
13	Poncowarno	0,7320	Maju
14	Sri Purnomo	0,6013	Berkembang
15	Agung Timur	0,5505	Tertinggal
16	Sinar Rejo	0,6067	Berkembang
17	Kalisari	0,6012	Berkembang

Sumber: Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kalirejo terdapat 5 desa yang masih berstatus desa tertinggal. Hal ini menjadi perhatian bagi para Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan. Peran dari Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. berdasarkan permasalahan tersebut menurut peneliti salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan pendamping desa yang berkompeten dan berintegritas serta proses rekrutmen yang terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya proses rekrutmen dari Pendamping Desa.

Kinerja Pendamping Lokal Desa sangat selaras dengan mutu pembangunan desa, dalam proses pelaksanaan kinerja yang kurang baik sangat mempengaruhi pembangunan desa. Namun pendampingan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa menimbulkan banyak kekecewaan di daerah. Program pendampingan desa dengan 32.000 pendamping yang

menyerap hampir separuh dari anggaran Kementerian dianggap tidak memberikan dampak yang jelas bagi kemandirian desa. Pendampingan Lokal Desa tidak mampu mempertahankan semangat partisipasi masyarakat dan keswadayaan desa yang pernah dibangun melalui PNPM. (Sumber: <http://Detik.com> di akses pada Sabtu 21 Januari 2017 pukul 19.21)

Berdasarkan dengan penelitian ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan:

1. Penelitian oleh Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah (2015) dalam jurnal Administrasi Negara yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah masyarakat telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.
2. Penelitian oleh Sispa Pebrian, dkk (2012) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Terhadap

Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) terhadap keberdayaan masyarakat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik pemanfaat terhadap keberdayaan pemanfaat dapat dilihat dari profil pemanfaatan, modal yang dimiliki dan masyarakat/lingkungan keluarga. Sedangkan Pendampingan tidak berpengaruh nyata terhadap keberdayaan yang dilihat dari kinerja pendampingan yang sangat rendah, dimana pendamping belum mampu membuat pemanfaat menyusun proposal secara mandiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Merie Larasati (2016) dalam skripsi Administrasi Negara yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Sehat Melalui Program Promosi Kesehatan di Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur”. Penelitian ini menggambarkan mengenai proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat di Desa Margosari dan juga mengetahui faktor pendukung keberhasilan proses pemberdayaan. Hasil penelitian menggambarkan proses pemberdayaan dan mekanisme pengelolaan dana sehat sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas kegiatan dana sehat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana kinerja individu dari Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan serta apa saja faktor yang mempengaruhi

kinerja dari Pendamping Lokal Desa. Melihat fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Lokal Desa di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Ukuran mengenai baiknya kinerja tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni “Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* (pelaksanaan dari sebuah tanggungjawab) yaitu suatu pekerjaan lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat dioptimalkan. Penilaian dari suatu pekerjaan menentukan kedudukan rasio pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi (Haynes dalam Sinambela, 2012:5).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Rumusan di atas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya (Prawirosentono, 1999:2).

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target dan

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja kelompok yaitu hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok, dan perbedaan-perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan secara individu dan kelompok (Rivai dan Basri, 2005:14).

Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangat diperlukan, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan. Kinerja pegawai harus dikelola, karena tanpa penetapan beban tugas dan arahan yang jelas pegawai tidak akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya (Sinambela, 2012:5).

Kinerja pegawai dapat dilihat dalam 3 kriteria menurut Robbins (1996:75), yaitu:

- a. Hasil-hasil tugas individual. Menilai hasil tugas pegawai dapat dilakukan pada suatu badan usaha yang sudah menetapkan standar kinerja sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan standar kinerja sesuai dengan jenis pekerjaan, yang dinilai berdasarkan periode waktu tertentu. Bila pegawai dapat mencapai standar yang ditentukan berarti hasil tugasnya baik.
- b. Perilaku, perusahaan tentunya terdiri dari banak pegawai baik bawahan maupun atasan dan dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kerja yang mempunyai perilaku masing-masing berbeda karena itu seorang pegawai dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan benar sesuai dengan pekerjaan masing-masing

- c. Ciri atau sifat, ini merupakan bagian terlemah dari kriteria kinerja yang ada. Ciri atau sifat pegawai pada umumnya berlangsung lama dan tetap sepanjang waktu, tetapi adanya perubahan-perubahan dan campur tangan dari pihak luar seperti diadakannya pelatihan akan mempengaruhi kinerja dalam beberapa hal.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai kinerja di atas dapat dimaknai bahwa kinerja merupakan pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan yang berorientasi pada standar hasil kinerja.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Keberhasilan dari sebuah kerja merupakan suatu sasaran yang ingin didapatkan oleh individu. Namun, proses untuk mendapatkan keberhasilan dari sebuah pekerjaan terdapat faktor yang bisa mempercepat atau memperlambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kinerja sangat penting untuk diketahui agar pencapaian dari suatu pekerjaan bisa didapatkan.

Kinerja dari individu dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya (Simanjutak, 2005):

1. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai (individu). Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan pegawai serta adanya pelatihan.

2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja. Dengan adanya sarana kerja dan lingkungan kerja yang baik akan membuat kinerja dari pegawai (individu) meningkat.

Dari pendapat ahli mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja individu di atas, peneliti memaknai bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja merupakan faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat bagaimana kinerja pegawai (individu) dan sangat penting untuk diketahui agar nantinya individu dalam bekerja dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu untuk diperhatikan dalam pencapaian suatu pekerjaan.

3. Penilaian Kinerja

Teknik yang digunakan oleh seorang pimpinan untuk meningkatkan kinerja adalah melalui penilaian (*appraisal*) motivasi pegawai untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan di masa mendatang yang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan pengembangannya. Penilaian mengenai kinerja digunakan untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan tersebut (Simamora dalam Sinambela, 2012:47).

Penilaian kerja (*performance appraisal*) adalah proses di mana organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Dalam penilaian kinerja dinilai

kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Umpan balik dari kinerja (*performance feedback*) memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik mereka dalam bekerja. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi kerja (*job evaluation*). Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang diberikan. Evaluasi kerja menentukan seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi (Sinambela, 2012:47).

Penilaian kinerja adalah sebuah mekanisme untuk memastikan bahwa orang-orang pada setiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara yang diinginkan oleh atasan mereka. Penilaian kinerja menentukan kedudukan dalam suatu pekerjaan. Penilaian kinerja juga merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan hasil yang adil berdasarkan tingkat pekerjaan dan tingkat prestasi (Rao dalam Sinambela, 1996:1).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dari proses kerja yang dilaksanakan yang berkaitan dengan standar dari pekerjaan yang telah ditentukan. Suatu pekerjaan harus dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pencapaian dari pekerjaan tersebut telah dilakukan.

4. Tujuan Penilaian Kinerja

Metode penilaian kinerja menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat bagus tidaknya penilaian kinerja yang dilakukan akan dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaian yang dipilih dan diimplementasikan. Penilaian kerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang sangat penting, suatu organisasi merancang program penilaian kinerja untuk memberikan informasi terkait pencapaian dari kinerja.

Tujuan dari penilaian kinerja menurut Cummings dan Donald (Sinambela, 2012:61) adalah:

1. Untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluatif atau yang memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai.
2. Untuk mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan.
3. untuk pengembangan berbagai karya lewat program-program yang telah dilaksanakan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan sebagai (Sastrohadiwiryo 2003:233):

1. Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan jangka panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.
2. Nasihat yang perlu disampaikan kepada para tenaga kerja dalam perusahaan.
3. Alat untuk memberikan umpan balik (*feed back*) yang mendorong ke arah kemajuan dan kemungkinan memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga kerja.
4. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang pemegang tugas dan pekerjaan.
5. Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan, baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan lainnya.
6. Standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi serta administrasi bagi tenaga kerja.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai landasan atau bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang ketenagakerjaan dan sebagai bahan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan.

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur. Untuk menetapkan indikator kinerja, harus dapat diidentifikasi suatu bentuk pengukuran yang akan menilai hasil *outcome* yang diperoleh dari aktivitas yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja pegawai tersebut membuat kemajuan menuju tujuan dan sasaran dalam rencana strategis.

Instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu. Substansi mengenai indikator pengukuran kinerja ini terdiri atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur (Sedarmayanti, 2007) meliputi:

- a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
- c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup kejujuran, tanggungjawab, dan disiplin.

- d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kinerja menurut Sedarmayanti, dapat dimaknai bahwa kinerja individu merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang yang sesuai dengan keahlian, perilaku dan kepemimpinan yang dimiliki oleh individu tersebut. Kinerja harus memberikan pelayanan publik dengan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih menggunakan indikator tentang pengukuran kinerja yang dikemukakan oleh Sedarmayanti karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa.

B. Konsep Pendamping Desa

1. Peraturan Tentang Pendamping Desa

Peraturan tentang pendampingan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada

masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.

- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

2. Tugas Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, tugas dari Pendamping Lokal Desa yaitu:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud

jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.

7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.
9. Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa.

C. Konsep Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3).

Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *top-down*. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi (*production development centre*) (Adisasmita, 2013:4).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. pembangunan masyarakat desa dapat di lakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya

manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada

pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (Adisasmita, 2013:57).

Pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera (Adisasmita, 2006:22).

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari pengertian mengenai pembangunan desa dapat dimaknai bahwa tujuan dari pembangunan desa suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antar wilayah pedesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi.

3. Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Setiap negara menerapkan strategi pembangunan untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakat.

Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, terdapat empat jenis strategi menurut Adisasmita (2013:76) yaitu:

a. Strategi Pertumbuhan (*The Growth Strategy*)

Strategi pertumbuhan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

b. Strategi Kesejahteraan (*The Welfare Strategy*)

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.

- c. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat (*The Responsive Strategy*)

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa.

- d. Strategi Terpadu Menyeluruh (*The Integrated Or Holistic Strategy*)

Strategi terpadu dan menyeluruh tersebut ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dari penjelasan mengenai strategi pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa strategi pembangunan desa dimaksudkan agar kemandirian desa serta tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Pendampingan desa merupakan suatu implementasi program Pemerintah dan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan percepatan pembangunan di desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. dengan adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Undang-Undang Desa mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Pendampingan dalam konteks Undang-Undang Desa lebih ditekankan pada kerangka pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, institusi asli dan atau yang sudah ada di desa dan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Menghadapi tantangan zaman akan kemajuan, maka kredibilitas dari Pendamping Lokal Desa diuji untuk dapat melaksanakan tanggungjawab pendampingan pemerintahan desa secara baik. Adanya fenomena citra buruk Pendamping Lokal Desa di mata masyarakat dan masih banyaknya agenda pembangunan desa yang harus di penuhi membuat kinerja Pendamping Lokal Desa kembali di pertanyakan. Seperti apa kinerja Pendamping Lokal Desa, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.

Suatu kinerja diukur berdasarkan kriteria dan standar penilaian tertentu. Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian ini, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran yang sistematis untuk memecahkan masalah. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang di miliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif semata. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Desa agar bisa dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan mengenai indikator kinerja, menurut Sedarmayanti terdapat empat konsep yang dapat digunakan mengukur kinerja individu yaitu:

- a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja. Dalam penelitian ini, standar dari pencapaian tujuan yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa harus sesuai dengan pelaksanaan kerja yang dilakukan dalam melaksanakan tugas.

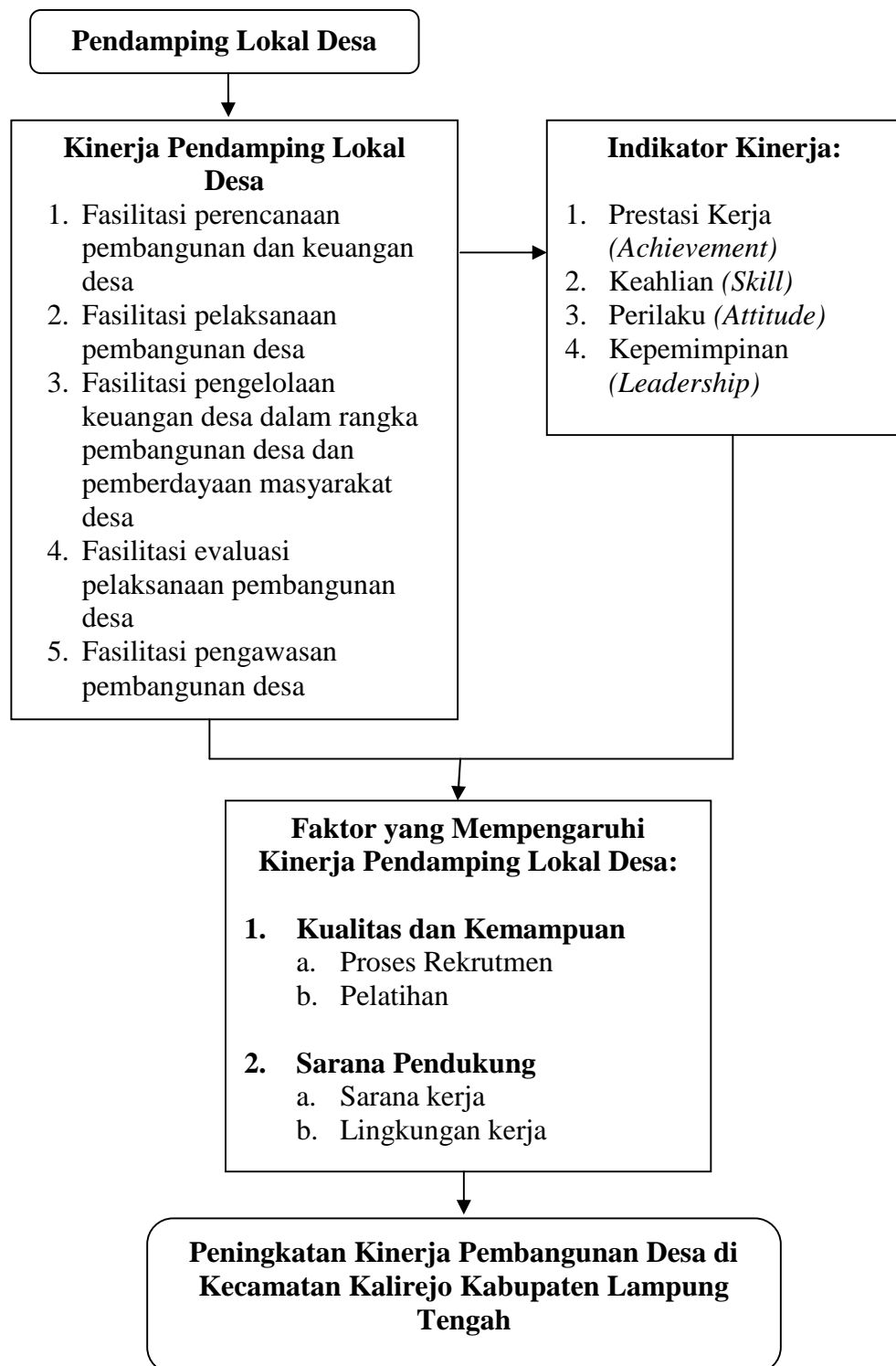
- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang di miliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain. Seorang pendamping desa harus memiliki kemampuan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu keahlian dalam bentuk kerjasama harus di miliki karena dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya pendamping desa berkomunikasi dengan aparatur desa dan masyarakat.
- c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Seorang pendamping desa harus memiliki perilaku yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, pendamping desa berinteraksi dengan masyarakat yang ada di pedesaan yang biasanya masih sangat memegang teguh nilai dan norma-norma kesopanan dalam masyarakat. Oleh karena itu pendamping desa dituntut untuk memiliki perilaku yang baik.
- d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Berdasarkan indikator kinerja, dalam melihat kinerja dari individu juga perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja individu tersebut. Guna mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja, dalam

penelitian ini peneliti juga melihat faktor yang berpengaruh pada kinerja khususnya kinerja dari Pendamping Lokal Desa diantaranya:

- a. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai. Kualitas dan kemampuan pegawai yang baik bisa didapatkan dari proses rekrutmen yang benar dan sesuai dengan standar penerimaan pegawai. Sedangkan untuk etos kerja, sikap mental, motivasi kerja serta kondisi fisik dari pegawai, disini peneliti melihat bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dalam mewujudkan kinerja yang baik.
- b. Sarana pendukung, yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja. Sarana kerja serta lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai. Dengan adanya sarana kerja serta lingkungan kerja yang baik tentunya akan membuat kinerja dari pegawai meningkat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir
 Sumber: Data diolah peneliti, 2017

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe kualitatif yang dideskriptifkan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Tipe penelitian kualitatif digunakan karena penelitian kualitatif dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama (Sugiyono, 2014:7). Serta dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga di sebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan di sebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi

yang alamiah (*natural setting*), di sebut juga sebagai metode *ethnographi* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrumen*.

Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Hadari Nawawi, 1991:63). Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan tentang bagaimanakah kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif ialah karena sifat dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak digambarkan ialah mengenai kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja dari Pendamping Lokal Desa. Selain itu pelaksanaan dari penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data semata, tetapi juga menganalisis, mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci sehingga dapat

menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif digunakan dengan alasan agar lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda, selain itu metode kualitatif membangun hubungan langsung antara peneliti dengan informan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kurang atau tanpa masalah baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti (Moleong, 2006:92). Pada fokus penelitian dimaksudkan untuk membantu peneliti agar dapat melakukan penelitiannya.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang kajian penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:
 - a. Prestasi kerja (*achievement*), yaitu hasil kerja individu dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja, indikatornya adalah:
 - 1) Standar pencapaian tujuan dalam bekerja
 - 2) Kesesuaian pelaksanaan kerja dengan pencapaian kerja yang didapatkan.

- b. Keahlian (*skill*), yaitu kemampuan teknis yang di miliki oleh individu dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, indikatornya adalah:
 - 1) Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan.
 - 2) Kesesuaian pengetahuan dengan proses pelaksanaan kerja.
 - c. Perilaku (*attitude*), yaitu sikap dan tingkah laku individu yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, indikatornya adalah:
 - 1) Tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan
 - 2) Kesesuaian tanggungjawab dengan standar pencapaian tujuan
 - d. Kepemimpinan (*Leadership*), ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberi pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas, indikatornya adalah:
 - 1) Kemampuan dalam berkoordinasi
 - 2) Kesesuaian koordinasi dengan keputusan yang diambil dalam pencapaian tujuan.
2. Faktor yang berpengaruh pada kinerja individu. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja individu:
- a. Kualitas dan kemampuan individu. Yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, dan kondisi fisik pegawai. Disini peneliti akan melihat

bagaimana kualitas dan kemampuan dari Pendamping Lokal Desa dengan melihat bagaimana proses rekrutmen dan pelatihannya.

- b. Sarana pendukung, yaitu merupakan hal yang berhubungan dengan sarana kerja dan lingkungan kerja dari Pendamping Lokal Desa.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April tahun 2017 dan berlokasi di desa yang berada di Kecamatan Kalirejo. Adapun objek dari penelitian ini adalah Kepala Desa dan Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta Pendamping Desa tingkat kecamatan. Alasan penelitian dilakukan pada Pendamping Lokal Desa adalah karena Pendamping Lokal Desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam pembangunan desa.

Alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian pada Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk membuktikan sudah sesuai atau tidak pembangunan yang telah dicapai oleh Kecamatan Kalirejo dengan kualitas kinerja dari Pendamping Lokal Desa. Proses pengumpulan data penulis dapatkan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh di lokasi penelitian, dan nantinya penelitian ini akan memperoleh deskripsi tentang penjelasan Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai macam bentuk yakni foto, peta, wawancara terbuka (menggali informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan), observasi (melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti), dokumentasi (penambahan informasi melalui data-data yang telah ada), dan sumber lainnya (Neuman, 2013:57). Jenis-jenis data sekaligus sebagai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan (Lofland dalam Moloeng, 2006:157). Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari studi lapangan atau penelitian empiris melalui wawancara dengan informan. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pendampingan desa. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang akan menjadi informan dipilih berdasarkan pada pemahaman dan pengetahuan mengenai kinerja dari pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan faktor yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa. Adapun kriteria yang dijadikan ketentuan pemilihan informan antara lain :

- a. Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah (Selaku mitra kerja dari Pendamping Lokal Desa)
- b. Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah (Unsur yang memiliki tugas melakukan pendampingan desa)
- c. Pendamping Desa tingkat kecamatan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah (Unsur pengawas jalannya pendampingan oleh Pendamping Lokal Desa)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang di peroleh dari data primer. Data sekunder biasanya berupa data-data yang telah ada berupa arsip dan dokumentasi, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya (Lofland dalam Moloeng, 2006:157). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Petunjuk Teknis Pendampingan Desa, Panduan Rekrutmen Pendampingan Desa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:308). Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisisnya. Pada pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Teknik Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang di butuhkan dalam penelitian langsung dari narasumber yang bersangkutan dan mengetahui tentang peristiwa tersebut, sehingga antara pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu konteks kejadian secara timbal balik. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka di mana peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.

Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan dari hasil wawancara tersebut. Berikut adalah informan penelitian yang telah dilakukan proses wawancara:

Tabel 5. Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Mutholib	Pendamping Lokal Desa
2	Ahmad Tauhid	Pendamping Lokal Desa
3	Iwanudin	Pendamping Lokal Desa
4	Ni'matul Maghfiroh	Pendamping Lokal Desa
5	Ahmad Safei	Pendamping Lokal Desa
6	F. Suparwanto	Kepala Desa Sri Waylangsep
7	Mulyadi	Kepala Desa Way Krui
8	M. Khozin	Kepala Desa Kalirejo
9	Lestari	Kepala Desa Balai Rejo
10	Iskandar	Kepala Desa Sri Basuki
11	Siti Umi Kulsum	Kepala Desa Kaliwungu
12	Supono	Kepala Desa Kalidadi
13	Yahyo	Kepala Desa Srimulyo
14	Salikhun	Kepala Desa Sridadi
15	Daroji	Kepala Desa Sukosari
16	Lukman	Kepala Desa Watu Agung
17	Sutikno	Kepala Desa Sinar Sari
18	Syobirin	Kepala Desa Poncowarno
19	Suharno	Kepala Desa Sri Purnomo
20	Supriyanto	Kepala Desa Agung Timur
21	Kasran	Kepala Desa Sinar Rejo
22	Martoyo Sekriyanto	Kepala Desa Kali Sari
23	Muslim Anshori	Pendamping Desa

Sumber: Data Primer diolah peneliti (2017)

Berdasarkan data dari tabel 5, dapat diketahui bahwa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah dua puluh tiga orang. Informan tersebut terdiri dari lima orang merupakan Pendamping Lokal Desa, tujuh belas orang merupakan kepala desa di Kecamatan Kalirejo, dan satu orang merupakan Pendamping Desa tingkat kecamatan. Informan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia (Hikmat, 2011:83). Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar, serta dokumentasi media online.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Shapiro, 2014: 25-26). Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni proses pendampingan dalam peningkatan pembangunan desa. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti seperti pada proses pendampingan desa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah menimbang, mengatur, mengaplikasikan, menimbang dan menyaring data berarti benar-benar memilih secara hati-hati data yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengaplikasikan berarti mengelompokkan, menyusun, dan menggolongkan menjadi satu kemudian dapat dibuat menjadi klarifikasi dan kategori (Kurniawan, 2012:31). Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan teknik mengelola data dengan cara meneliti kembali data yang telah di peroleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian selanjutnya. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama pihak Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, dan Pendamping Desa tingkat kecamatan yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa

kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi merupakan upaya yang digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merujuk pada kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu di dalam rangka penginterpretasian data (Faisal, 2010:33). Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Sedangkan Analisis data merupakan kegiatan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami (Suyanto, 2011:140). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data mengenai kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan pendampingan dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti mewawancarai informan yaitu Pendamping Lokal Desa, Kepala Desa, dan Pendamping Desa tingkat Kecamatan menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan.

Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang belum berjalan dengan maksimal.

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

H. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui tiga cara yaitu pengecekan kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmabilitas (Miles dan Huberman, 1993:73). Pengecekan kredibilitas atau kebenaran data diperoleh melalui klarifikasi dengan membaca transkrip hasil wawancara dan observasi. Transkrip yang salah akan diketik ulang kemudian diserahkan kepada subyek untuk diperiksa ulang dan ditanda tangani. Kebenaran data pada setiap komponen manajemen juga dilihat secara kritis dari berbagai sudut pandang pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Kalirejo

1. Letak Geografis

Kecamatan Kalirejo merupakan salah satu dari 28 Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, dengan jarak dari ibu kota Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih adalah 56 Km dan dari ibu kota Propinsi Lampung di Bandar Lampung adalah 76 Km.

Kecamatan Kalirejo berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan. Padang Ratu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bangunrejo
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung.

Wilayah Kecamatan Kalirejo mulai dibuka pada tahun 1950 yang masih berupa kawasan hutan tebang, dan mulai dihuni penduduk secara tetap pada tahun 1951. Pada tahun 1957 dibentuk perwakilan Kecamatan Padang Ratu di Kalirejo dengan membawahi dan membina sebanyak 14 desa. Kemudian pada tahun 1964 dibentuklah Pemerintahan Kecamatan Kalirejo dengan ibu kota di Kalirejo yang membawahi dan membina 12 desa definitif.

Kemudian Kecamatan Kalirejo mengalami pemekaran beberapa desa sehingga berjumlah 22 desa. Selanjutnya Kecamatan Kalirejo mengalami pemekaran, yaitu Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung yang membawahi 9 desa, sehingga pada akhirnya Kecamatan Kalirejo terdiri dari 13 kampung, yaitu:

1. Kalirejo
2. Kaliwungu
3. Kalidadi
4. Sribasuki
5. Sridadi
6. Srimulyo
7. Sriwaylangsep
8. Balairejo
9. Poncowarno
10. Sinarsari
11. Sukosari
12. Watu Agung
13. Wayakrui

Sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan 19 Kampung dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo terdapat 3 Kampung Pemekaran yaitu:

1. Kampung Agung Timur pemekaran dari Kampung Watu Agung.
2. Kampung Sinar Rejo pemekaran dari Kampung Poncowarno.

3. Kampung Sri Purnomo pemekaran dari Kampung Srimulyo.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 18/KPTS/LTD.6/2011 Tanggal 12 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Kampung, maka pada tanggal 31 Januari 2011 dilaksanakan Peresmian Kampung Sri Purnomo, Kampung Sinar Rejo, Kampung Agung Timur menjadi kampung definitif sekaligus Pelantikan pejabat kepala kampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang peresmian 7 Kampung dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka pada tanggal 22 April 2015 diresmikan Kampung Kalisari yang merupakan kampung pemekaran dari kampung induk Kalidadi. Sehingga Kecamatan Kalirejo membawahi 17 Kampung, yaitu :

1. Kalirejo
2. Kaliwungu
3. Kalidadi
4. Sribasuki
5. Sridadi
6. Srimulyo
7. Sriwaylangsep
8. Balairejo
9. Poncowarno
10. Sinarsari

11. Sukosari
12. Watu Agung
13. Wayakrui
14. Sri Purnomo
15. Sinarrejo
16. Agung Timur.
17. Kalisari

2. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Kalirejo dari 17 kampung yaitu 10.128 Ha, yang terdiri dari 922 Ha lahan sawah dan 9.206 Ha lahan kering/bukan sawah. Tanah lahan sawah tersebut terdiri dari 500 Ha berpengairan setengah teknis, 132 Ha berpengairan non teknis/ sederhana dan 290 Ha berpengairan tadah hujan. Sedangkan tanah bukan sawah/lahan kering terdiri dari 5.943 Ha sebagai lahan pertanian/perkebunan, dan 3.263 Ha sebagai lahan non pertanian. Peruntukan bangunan perumahan dan permukiman seluas 2.752 Ha dan seluas 511 Ha diperuntukan lahan lainnya (jalan, sungai, pemakaman, lapangan, dll).

3. Kependudukan

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 17 kampung dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.776 jiwa. Tabel jumlah penduduk di Kecamatan Kalirejo dari 17 kampung dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 6. Jumlah penduduk Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kampung/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kalirejo	5.026	4.665	9.691
2	Kaliwungu	2.368	2.131	4.499
3	Sridadi	2.473	2.258	4.731
4	Poncowarno	4.074	3.886	7.960
5	Sinarsari	1.624	1.519	3.143
6	Watu Agung	2.160	2.076	4.236
7	Sukosari	1.890	1.676	3.566
8	Sribasuki	1.339	1.255	2.594
9	Balarejo	2.167	2.012	4.179
10	Waya Krui	354	335	689
11	Sri Waylangsep	1.288	1.259	2.547
12	Kalidadi	2.617	2.548	5.055
13	Srimulyo	1.360	1.310	2.668
14	Agung Timur	1.264	1.351	2.615
15	Sinar Rejo	491	434	925
16	Sri Purnomo	1.742	1.675	53.417
17	Kalisari	579	589	1.168
Jumlah		32.916	30.860	63.776

Sumber: Monografi Kecamatan Kalirejo

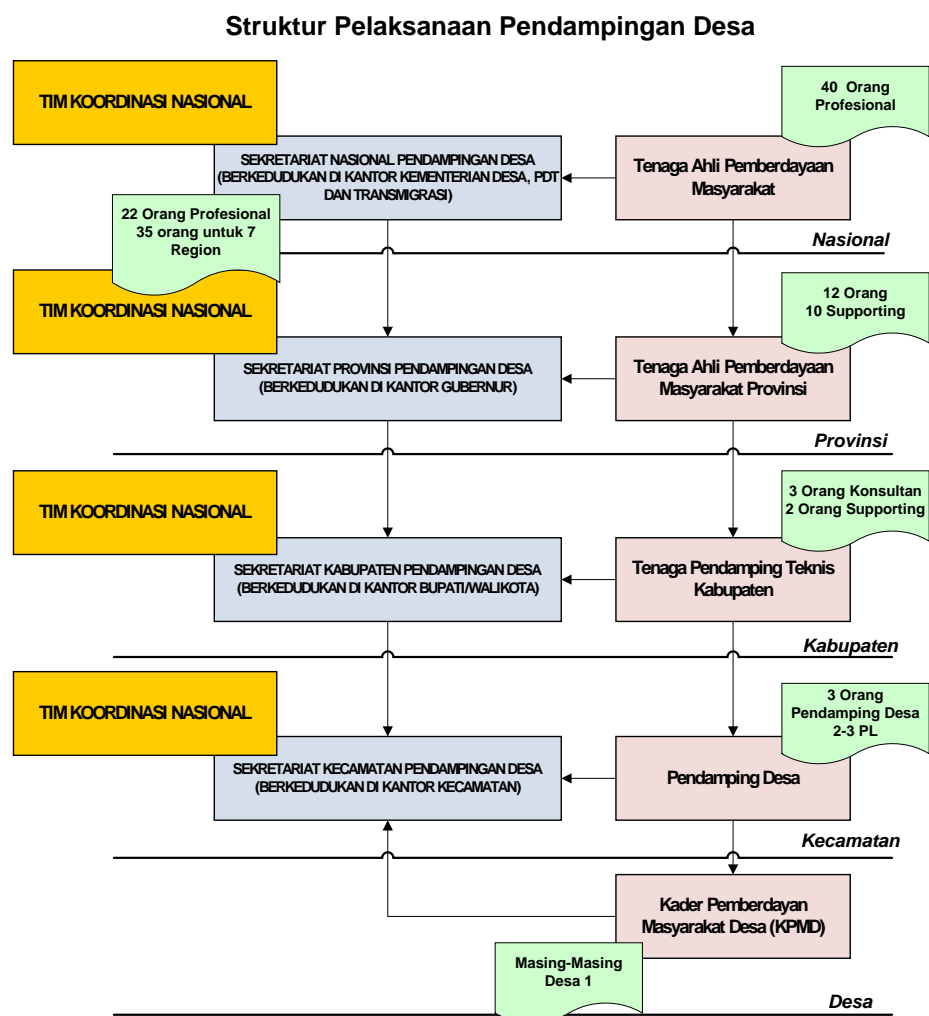
B. Gambaran Umum Pendampingan Desa

1. Struktur Pelaksanaan Pendampingan Desa

Tujuan pendampingan desa diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Guna mensukseskan tujuan dari pendampingan desa, pelaksanaan pendampingan harus dijalankan dengan maksimal. Pendampingan harus dikelola secara sungguh-sungguh, oleh karena itu Pendamping Lokal Desa harus dapat menunjukkan semangat dan kesungguhan di dalam melaksanakan segenap tugas dan pekerjaanya. Struktur pendampingan desa dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Pendampingan Desa
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Pendamping Desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan UU Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. Kewenangan desa dikelola dalam tata pemerintahan desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama yaitu: musyawarah desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) dan masyarakat desa.

2. Profil Pendamping Lokal Desa Kecamatan Kalirejo

Intisari dari Pendampingan Desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya. Masyarakat desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Pengembangan kapasitas di desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.

Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari lima orang pendamping. Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah bertanggungjawab terhadap desa dampingan masing-masing yang terdiri dari tiga sampai

empat desa dampingan tiap-tiap Pendamping Lokal Desa. Profil Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Profil Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja bidang pembangunan desa	Lokasi Tugas
1	Mutholib	S2 Manajemen Pendidikan	-	Desa Sri Waylangsep, Kalidadi, Waya Krui
2	Ahmad Tauhid	S1 Pendidikan Agama Islam	Eks PNPM MPd	Desa Poncowarno, Sinar Rejo, Sri Purnomo, Sri Mulyo
3	Iwanudin	SMA	Ketua Karang Taruna Desa Sukosari	Desa Sridadi, Kaliwungu, Kalirejo, Sukosari
4	Ni'matul Maghfiroh	S1 PGSD	-	Desa Sri Basuki, Sinar Sari Agung Timur
5	Ahmad Safei	S1 Pendidikan Agama Islam	-	Desa Balai Rejo, Kalidadi, Sukosari, Watu Agung

Sumber: Diolah Peneliti 2017

Kerangka pikir pemberdayaan masyarakat Desa, penerapan Undang-Undang Desa harus dikawal oleh Pendamping Desa yang bertugas mengajarkan aturan legal kepada masyarakat desa. Pendampingan dan pelatihan dari Pendamping Desa kepada masyarakat desa diharapkan mempercepat proses internalisasi Undang-Undang Desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah:
 - a. Prestasi kerja (*achievement*) dari Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah belum memperlihatkan hasil yang positif dan belum dilaksanakan secara maksimal.
 - b. Keahlian (*skill*) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah serta tidak adanya pengalaman kerja yang dimiliki.
 - c. Perilaku (*attitude*) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya dan terkesan sewenang-wenang.
 - d. Kepemimpinan (*Leadership*) terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa belum maksimal dilaksanakan.

2. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah:
 - a. Kualitas dan kemampuan, terkait dengan etos kerja, motivasi kerja yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah hal ini dipengaruhi oleh proses rekrutmen dan pelatihan. Proses rekrutmen Pendamping Lokal Desa dilaksanakan tidak terbuka dan diindikasikan melibatkan salah satu partai politik sehingga dalam pelaksanaan kerja tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pelatihan hanya dilakukan satu kali sehingga pengetahuan yang diserap tidak maksimal kedua hal tersebut mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dalam percepatan pembangunan desa.
 - b. Sarana pendukung, untuk sarana kerja dari Pendamping Lokal Desa di seluruh desa tidak tersedia. Sedangkan untuk lingkungan kerja, masih terdapat desa yang belum menerima adanya Pendamping Lokal Desa yang mengakibatkan hubungan yang kurang baik antara kepala desa dan Pendamping Lokal Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung mengenai kinerja dari Pendamping Lokal Desa, pemerintah dapat memberikan *reward* kepada Pendamping Lokal Desa

yang berprestasi agar bisa lebih memotivasi pendamping untuk melaksanakan tugas dengan maksimal. Serta memberikan *punishment* untuk pendamping yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya.

2. Pemerintah perlu merevisi kembali persyaratan rekrutmen Pendamping Desa mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja dari calon Pendamping Lokal Desa dan harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Pemerintah perlu membentuk tim satuan kerja untuk melakukan peninjauan langsung terhadap bagaimana perilaku dan bentuk pertanggungjawaban kerja yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa.
4. Perlu adanya keterbukaan dan sosialisasi pada proses rekrutmen agar masyarakat bisa ikut mengawasi serta mengetahui apa saja standar penerimaan dari Pendamping Lokal Desa. Pemerintah juga perlu melaksanakan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Pelatihan dapat berupa pelatihan fisik agar pendamping dapat menjalankan tugas dengan maksimal, pelatihan moral dan spiritual agar didapatkan pendamping yang jujur dan berkompeten, pelatihan kedisiplinan agar didapatkan pendamping yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, pelatihan kepemimpinan agar pendamping bisa mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik.
5. Perlu adanya sarana kerja untuk Pendamping Lokal Desa agar dapat memotivasi pendamping dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra kerja yang baik untuk kepala desa dalam peningkatan pembangunan desa.

6. Kepala desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah harus ikut mengawasi proses pendampingan desa yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Jika Pendamping Lokal Desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik kepala desa berhak menegur dan melaporkan kepada Pendamping Desa tingkat kecamatan mengenai kinerja dari Pendamping Lokal Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- _____. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- _____. 2013. *Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metode Penelitian*. Jelajah Nusa: Tangerang.
- M. Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian; Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Miles, M.B. dan Hubberman. 1993. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. UI Press: Jakarta.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Posdakarya: Bandung.
- Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai dalam Organisasi Modern*. Rajawali Press: Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University: Yogyakarta.
- Neuman, W Laurence. 2013. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited

- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*. BPFE: Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, Ahmad Fawzi Mohd. Basri. 2005. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Robbins, Stephen P. 2000. *Essentials of organizational behavior*. Printice Hall International Inc: New Jersey.
- Sedarmayanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Shapiro, Ian. 2014. *Problems and Methods in the Study Politics*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siswanto, Sastrohadowiryo. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suyanto, Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Dokumen:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Petunjuk Teknis Pendampingan Desa.

Penelitian Terdahulu:

- Skripsi Administrasi Negara oleh Merie Larasati, tahun 2016 yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Sehat Melalui

Program Promosi Kesehatan di Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur”.

Jurnal Administrasi Negara oleh Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah tahun 2015 Vol.3, No.1 dengan judul “*Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*”.

Jurnal oleh Sispa Pebrian, dkk tahun 2012 Vol. 9 No.1 dengan judul “*Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) Terhadap Keberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi*”.

Sumber Lain:

<https://grahamuda.wordpress.com/2015/11/19/tugas-tugas-pokok-dan-fungsi-pendamping-desa/> diakses pada jumat 13 Januari 2017 pukul 12.05

<http://lampost.co/berita/kinerja-pendamping-lokal-desa-dinilai-belum-maksimal> diakses pada jumat 13 Januari 2017 pukul 13.11

<https://www.bangsaonline.com/berita/27513/pendamping-desa-dituding-mlempem-tenaga-ahli-ajak-kades-laporan-untuk-evaluasi-kinerja> diakses pada jumat 13 Januari 2017 pukul 11.55

<http://lampost.com> diakses pada jumat 13 Januari 2017 pukul 13.25.

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=10&date=2016-06-08> diakses pada Minggu 22 Januari 2017 pukul 10.26.

<http://jatim.metrotvnews.com/read/2016/03/25/503898/kinerja-pendamping-desa-kades-mereka-malah-tolah-toleh-> diakses pada Jumat 20 Januari 2017 pukul 10.14.

<https://www.skhemorandum.com/daerah/madura/item/9311-kinerja-pendamping-desa-perlu-dievaluasi> diakses pada Sabtu 21 Januari 2017 pukul 09.12

<http://borneonews.co.id/berita/27374-tenaga-pendamping-lokal-desa-berhenti-bertugas> di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 20.27

<http://menaranews.com/pendamping-desa-dan-pendamping-lokal-desa-kabupaten-tubaba-dinilai-belum-optimal> di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 20.38

<http://portalsatu.com/read/news/pendamping-lokal-desa-di-pidie-ada-yang-rangkap-pekerjaan> di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 20.53

<http://news.luwukpost.info/2015/11/13/luktar-kebagian-5-pendamping-desa> diakses pada Selasa 7 Februari 2017 pukul 19.01

<http://m.nganjuktimes.com/baca/139005/20160329/133245/kisruh-pd-dan-pld-di-bondowoso-pembangunan-desa-bisa-terganggu> di akses pada Selasa 7 Februari 2017 pukul 19.27

<http://Detik.com> di akses pada Sabtu 21 Januari 2017 pukul 19.21

<http://Liputan6.com> di akses pada pada Jumat 13 Januari 2017 pukul 19.57

[http:// forum.liputan6.com](http://forum.liputan6.com) di akses pada Senin 6 Februari 2017 pukul 19.55